

Pengaruh Harga Komoditi Pangan (Beras, Cabai, Bawang) Terhadap Inflasi di Aceh Barat

Alisman¹, Hafsah^{2*}

¹Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Meulaboh, Aceh, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima 22, 02, 2024
Disetujui 23, 02, 2024
Diterbitkan 24, 02, 2024

Katakunci:

Harga Komunitas Pangan,
Inflasi

ABSTRACT

Penelitian ini untuk melihat pengaruh harga komoditi pangan (beras, cabai, bawang) terhadap inflasi di Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yang terdiri atas dua variabel, yaitu Harga Komoditi Pangan sebagai variabel bebas (*independent*) dan Inflasi sebagai variabel terikat (*dependent*). Penelitian ini difokuskan pada komoditas pangan dan inflasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Objek penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 19 orang dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak (*Random Sampling*). Analisis data secara kuantitatif dengan model analisis datanya yaitu secara regresi linear sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel harga komoditi pangan (beras, cabai dan bawang) memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat Inflasi di Kabupaten Aceh Barat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Cara Sitasi Artikel ini dalam APA:

Alisman, & Hafsah. (2024). Pengaruh Harga Komoditi Pangan (Beras, Cabai, Bawang) Terhadap Inflasi di Aceh Barat. LANCAN: Jurnal Inovasi Dan Tren, 2(1), 185~193. <https://doi.org/10.35870/ljit.v2i1.2299>

Penulis Korespondensi:

Hafsah

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Meulaboh, Aceh, Indonesia
hafsahsepuluh12@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Inflasi adalah suatu proses dimana harga-harga meningkat secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai, seperti meningkatnya konsumsi masyarakat, berlebihnya likuiditas di pasar, ataupun akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi (Penangsang et al., 2020).

Menurut Mankiw (2020:16) inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas perekonomian. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, inflasi merupakan isu perekonomian yang selalu menjadi perhatian penting. Inflasi yang rendah dan stabil akan menjadi stimulator dalam pertumbuhan ekonomi. Inflasi seringkali dikaitkan dengan gejolak sosial, politik dan ekonomi di suatu negara (Panjaitan & Wardoyo, 2016).

Laju perubahan inflasi selalu diupayakan rendah dan stabil. Hal ini untuk menghindari terjadinya masalah makro ekonomi yang dapat memberikan dampak ketidakstabilan pada perekonomian. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan akan kecenderungan naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama periode waktu tertentu. Inflasi yang terjadi di setiap daerah dapat diakibatkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi sisi permintaan, sisi penawaran dan ekspektasi.

Salah satu indikator ekonomi yang dapat menunjukkan baik atau buruknya perekonomian suatu daerah adalah inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, namun demikian tidak berarti bahwa deflasi selalu menggambarkan hal yang positif. Perekonomian suatu daerah dikatakan semakin baik ketika angka inflasi di daerah tersebut stabil (Usman et al., 2020).

Inflasi yang terjadi di Kab. Aceh Barat terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh meningkatnya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,29 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,91 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,54 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,91 persen; kelompok kesehatan sebesar 9,49 persen; kelompok transportasi sebesar 12,91 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,11 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 4,63 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,73 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,44 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,71 persen (BPS., 2023).

Perubahan harga pada komoditas bahan pangan merupakan penyumbang terbesar laju inflasi Nasional (Penangsang et al., 2020). Inflasi yang terjadi di setiap daerah dapat diakibatkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi sisi permintaan, sisi penawaran dan ekspektasi.

Salah satu indikator ekonomi yang dapat menunjukkan baik atau buruknya perekonomian suatu daerah adalah inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, namun demikian tidak berarti bahwa deflasi selalu menggambarkan hal yang positif. Perekonomian suatu daerah dikatakan semakin baik ketika angka inflasi di daerah tersebut stabil (Usman et al., 2020).

Inflasi yang terjadi di Kab. Aceh Barat terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh meningkatnya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,29 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,91 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,54 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,91 persen; kelompok kesehatan sebesar 9,49 persen; kelompok transportasi sebesar 12,91 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,11 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 4,63 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,73 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,44 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,71 persen (BPS., 2023)

Perubahan harga pada komoditas bahan pangan merupakan penyumbang terbesar laju inflasi Nasional (Penangsang et al., 2020). Hal ini tidak jauh berbeda dengan Kota Parepare yang tingkat inflasi umumnya dikarenakan kenaikan pada kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau. Menurut Rahmanta & Maryuniarta (2020) Fluktuasi harga komoditas pangan terjadi secara cepat sehingga sangat

dibutuhkan adanya kebijakan stabilitas harga pangan. Pemberlakuan kebijakan tersebut akan memberikan tiga keuntungan yaitu:

1. Petani selaku produsen terlindungi dari penurunan harga yang menjadikannya mampu berlaku lebih efisien.
2. Melindungi konsumen kelas menengah ke bawah yang berpendapatan rendah dari gejolak peningkatan harga yang mana dapat menjadi salah satu bentuk *social safety net*.
3. Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan kondisi makro ekonomi yang lebih stabil.

Perkembangan pada Desember 2022 menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi IHK pada Desember 2022 tercatat menjadi 0,66% (mtm) sehingga inflasi IHK 2022 menjadi 5,51% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2021 sebesar 1,87% (yoy) dan lebih tinggi dari sasaran 3,0±1%, terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022. Berbagai perkembangan bulanan menunjukkan inflasi pasca kenaikan harga BBM kembali terkendali tercermin pada ekspektasi inflasi dan tekanan inflasi yang terus menurun dan lebih rendah dari prakiraan awal.

Perkembangan inflasi IHK yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat respons kebijakan guna memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran 3,0±1%. Koordinasi kebijakan juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Inflasi IHK pada Desember 2022 terutama dipengaruhi oleh pola musimannya di akhir tahun. Inflasi inti tercatat sebesar 0,22% (mtm), meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,15% (mtm) terutama disumbang oleh komoditas kontrak rumah. Kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 2,24% (mtm), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,22% (mtm), sejalan dengan pola musiman akhir tahun. Kelompok administered prices mencatat inflasi sebesar 0,73% (mtm), meningkat dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,14% (mtm) seiring dengan kenaikan tarif perusahaan air minum, dan seiring dengan pola musiman peningkatan permintaan angkutan udara pada Natal dan Tahun Baru, serta inflasi rokok kretek filter.

Tekanan inflasi 2022 yang lebih rendah dari prakiraan awal berdampak positif pada prospek inflasi 2023 yang diprakirakan kembali ke sasaran 3,0±1%. Inflasi inti 2022 tetap terjaga rendah sebesar 3,36% (yoy), sejalan dengan lebih rendahnya dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan. Inflasi volatile food 2022 juga terkendali 5,61% (yoy) sebagai hasil sinergi dan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi melalui TPIP-TPID dan GNPIP dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif. Sementara itu, kenaikan inflasi administered prices juga tidak setinggi yang diperkirakan, menjadi 13,34% (yoy) sejalan dengan penyesuaian harga BBM dan tarif angkutan yang lebih rendah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat, mencatat angka inflasi di Kota Meulaboh, menyentuh angka 6.36 persen pada Januari 2023. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan Kota Banda Aceh yang hanya 5.58 persen dan Lhokseumawe 4.98 persen. Sementara secara agregat perhitungan inflasi secara keseluruhan gabungan dari tiga kota itu, Meulaboh, Banda Aceh dan Lhokseumawe, maka pada bulan Januari 2023 berdasarkan perhitungan Year on Year (YoY) Januari 2022 ke Januari 2023 Provinsi Aceh mengalami inflasi 5.52 persen.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yang terdiri atas dua variabel, yaitu Harga Komoditi Pangan sebagai variabel bebas (independent) dan Inflasi sebagai variabel terikat (dependent).

Penelitian ini difokuskan pada komoditas pangan dan inflasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Objek penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada kantor Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 19 orang dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak (*Random Sampling*). Analisis data secara kuantitatif yaitu suatu cara analisis terhadap data dan informasi yang terkumpul sesuai dengan kaedah penelitian kuantitatif. Data dan informasi yang dikumpulkan untuk disusun sesuai kebutuhan analisis kemudian dilakukan pengklasifikasian untuk dilakukan analisa.

Model analisis data yang digunakan yaitu regresi linear sederhana dengan persamaanya adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + e$$

Keterangan:

Y = Inflasi.

a = Konstan

b₁ = Koefisien

X₁ = Harga Komoditi Pangan

e = faktor pengganggu

3. HASIL

Sejarah Singkat Kantor Badan Pusat Statistik Aceh Barat

Masa pemerintahan Hindia Belanda Kantor Statistik, pertama kali didirikan oleh Department Van Lanbou, Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan) pada bulan Februari 1920 di Bogor. Kantor ini disertai tugas untuk mengolah dan mempublikasikan data statistik terutama yang berkaitan dengan bea dan cukai. Pada bulan September 1924 nama lembaga tersebut diganti menjadi Centraal Kantoor Voor de Statistiek (CKS atau Kantor Pusat Statistik) dan dipindahkan ke Batavia. Kantor Pusat Statistik, selain mencakup bidang administrasi mencakup juga bagian yang menangani Urusan Umum, Statistik Perdagangan, Statistik Pertanian, Statistik Kerajinan, Statistik Konjungtor, Statistik Sosial.

Produk perundang-undangan yang dihasilkan pada waktu itu diantaranya adalah Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 Nomor 128) yang menjadi dasar pelaksanaan Sensus Penduduk pada tahun 1930, dan Statistiek Ordonnantie 1934 (Staatsblad Nomor 508) tentang kegiatan perstatistikan.

Masa Pemerintahan Jepang Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Dengan demikian CKS beralih ke pemerintahan militer Jepang, dan kegiatannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang (data militer). Nama CKS diubah menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dan bernaung di bawah Gubernur Militer (Gunseikanbu). Masa Negara Kesatuan Republik Indonesia Kekalahan Jepang terhadap Sekutu menyemangati pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamkan. Pemerintahan baru dibawah Presiden Soekarno segera memberntuk lembaga-lembaga pemerintahan yang baru. Untuk menangani kegiatan statistik dibentuklah Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum (KAPPURI) yang dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo.

Pada awal 1946, KAPPURI pindah mengikuti berpindahnya pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta. Dilain pihak, CSK diaktifkan kembali oleh Pemerintah Federal (Belanda) berkedudukan di Jakarta. Berdasar surat edaran Kementrian Kemakmuran Nomor 219/SC, tanggal 12 Juni 1950, KAPPURI diubah menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dan berada di bawah naungan Kementrian Kemakmuran.

Peraturan ini diubah lagi pada tanggal 1 Maret 1952, Melalui Keputusan Menteri Perekonomian Nomor P/44, KPS dinyatakan berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Perekonomian. Pada tanggal 1 Maret 1952, Menteri Perekonomian mengeluarkan Keputusan Nomor P/44 yang menyatakan KPS berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Perekonomian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perekonomian Nomor 18.099/M Tanggal 24 Desember 1953, kegiatan KPS dibagi menjadi 2 bagian yaitu Afdeling A merupakan Bagian Riset dan Afdeling B merupakan Bagian Penyelenggaraan dan Tata Usaha. Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 172 Tahun 1957, terhitung mulai 1 Juni 1957, KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik, dan urusan statistik yang semula menjadi

tanggung jawab dan wewenang Menteri Perekonomian dialihkan menjadi wewenang dan langsung berada di bawah Perdana Menteri.

Berdasarkan Keppres ini pula secara formal nama Biro Pusat Statistik dipergunakan. Pada tanggal 24 September 1960, UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus diundangkan menggantikan Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 Nomor 128). Diikuti kemudian pada tanggal 26 September 1960, UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik diundangkan menggantikan Statistiek Ordonnantie 1934 (Staatsblad Nomor 508).

Berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 26/P.M/1958 tanggal 16 Januari 1958, BPS diberi tugas melakukan pekerjaan persiapan Sensus Penduduk. Kegiatan Sensus Penduduk terlaksana pada tahun 1961. Sensus Penduduk pertama yang dilakukan sejak masa kemerdekaan. Diberlakukannya UU Nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik, merupakan momen penting peralihan produk statistik kolonial menjadi statistik nasional.

Karena itulah, tanggal 26 September selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Statistik yang diperingati setiap tahun. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, kebutuhan terhadap data statistik semakin penting dan beragam. Karena itu diperlukan penyempurnaan terhadap perangkat hukum yang ada, sehingga pada tanggal 19 Mei 1997, Presiden Republik Indonesia mengesahkan berlakunya UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sekaligus mengubah nama Biro Pusat Statistik menjadi Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil Deskriptif Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 19 orang pegawai, dari kuisioner yang disebarkan pada responden dihasilkan gambaran karakteristik responden sebagai berikut :

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	7 orang	1,33%
2	Perempuan	12 orang	2,28%
Total		19 orang	

Sumber: Hasil Data diolah Peneliti, 2023

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7 orang atau sebanyak 1,33% dan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 12 orang atau sebanyak 2,28%. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada responden berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	SMA/Sederajat	6 orang	1,14 %
2	Diploma III	1 orang	0,19 %
3	S-1	11 orang	2,09 %
4	S-2	1 orang	0,19 %
Total		19 orang	100 %

Sumber : Hasil Data diolah Peneliti, 2023

Dari Tabel 2 diketahui bahwa responden yang berpendidikan SMA/Sederajat berjumlah 6 orang atau sebesar 1,14 % dan responden dengan pendidikan Diploma III berjumlah 1 orang atau sebesar 0,19 %, dan responden dengan pendidikan S-1 berjumlah 11 orang atau 2,09 %, dan responden dengan pendidikan S-2 berjumlah 1 orang atau 0,19 %.

Uji Kualitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Syarat minimum

untuk dianggap suatu butir instrumen valid yaitu nilai indeks validitasnya memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, dimana r_{tabel} diperoleh dari df (*degree of freedom*) = $n - 2$ dengan signifikan 5 % (0,05), dan n merupakan jumlah sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan Pusat Statistik Aceh Barat yang berjumlah 19 responden sehingga didapatkan r_{tabel} sebesar 0,1966. Hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r Tabel	Keterangan
Harga Komoditi Pangan (X)	X.1	0,725	0,1966	Valid
	X.2	0,555	0,1966	Valid
	X.3	0,845	0,1966	Valid
	X.4	0,780	0,1966	Valid
	X.5	0,722	0,1966	Valid
Inflasi (Y)	Y.1	0,784	0,1966	Valid
	Y.2	0,640	0,1966	Valid
	Y.3	0,824	0,1966	Valid
	Y.4	0,512	0,1966	Valid
	Y.5	0,784	0,1966	Valid
	Y.6	0,640	0,1966	Valid
	Y.7	0,669	0,1966	Valid

Sumber : Hasil Data diolah Peneliti 2023

Berdasarkan data dari tabel 3 di mana pengujian validitas instrumen penelitian (kuesioner) dengan masing-masing pertanyaan yang diajukan kepada pegawai Badan Pusat Statistik Aceh Barat memperoleh nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga keseluruhan instrumen penelitian tersebut dikatakan valid.

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47). Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha	Keterangan
Harga Komoditi Pangan (X)	0,944	Reliabel
Inflasi (Y)	0,974	Reliabel

Sumber : Hasil Data diolah Penelitian 2023

Analisa Korelasi (R) dan Determinasi (R²)

Menurut Sugiyono (2004) pedoman untuk interpretasi koefisien korelasi adalah: 1) 0,00- 0,199 = sangat rendah; 2) 2,00- 0,399 = rendah; 3) 0,40 – 0,59 = sedang; 4) 0,60- 0,799 = kuat; 5) 0,80- 1,00 = sangat kuat.

Tabel 5. Hasil Analisa Korelasi (R)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change
1	,952 ^a	,906	,906	1,135	,906	949,736	1	98	,000

a. Predictors: (Constant), Harga Komoditi Pangan

Sumber : Hasil Data diolah Penelitian 2023

Berdasarkan data dari tabel 5 di mana hasil analisa korelasi (R) menunjukkan berkorelasi dimana nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Interpretasi koefisien korelasi adalah 0,952 artinya sangat kuat karena berdasarkan nilai 0,80- 1,00 = sangat kuat.

Menurut Ghozali (2012:97) koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change
1	,952 ^a	,906	,906	1,135	,906	949,736	1	98	,000

a. Predictors: (Constant), Harga Komoditi Pangan

Sumber : Hasil Data diolah Penelitian 2023

Dilihat dari tabel 6 koefisien determinasi (R^2) berdasarkan responden menunjukkan angka *Adjusted R Square* 0,906 atau 90,60% yang berarti variasi variabel inflasi dapat di jelaskan oleh harga komoditi pangan sisanya 9,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini.

Analisa Regresi Linear Sederhana

Analisa regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisa ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas yaitu harga komoditi pangan (X) terhadap variabel terikat yaitu inflasi (Y). Besarnya pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat dapat dihitung melalui rumus suatu persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + e$$

Untuk menentukan persamaan regresi maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Analisa Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	3,002	,952		3,155	,002
1	Harga komoditi pangan	1,294	,042	,952	30,818	,000

a. Dependent Variable: Inflasi

Sumber : Hasil Data diolah Penelitian 2023

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diperoleh persamaan linear sederhana sebagai berikut :

$$Y = 3,002 + 1,294 X + e$$

Hasil analisa regresi sederhana yang masih berbentuk angka dapat di jelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 3,002 menunjukkan bahwa apabila variable independen Harga komoditi pangan tidak ada maka inflasi tetap ada sebesar 3,002 satuan.
- Koefisien regresi Harga komoditi pangan (X) sebesar 1,294 menunjukkan bahwa kenaikan Harga komoditi pangan sebesar satu satuan akan menaikkan Inflasi sebesar 1,294 satuan.

Uji parsial (t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variable independen secara individual (parsial) terhadap variable dependen dengan tingkat signifikansi (alpha) 5% atau 0,05. Adapun kriteria pengujian pada penelitian ini menurut Gunawan (2018:75) adalah :

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{table}$ dan signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variable independen dan dependen secara signifikan. Jika $Sig\ t_{hitung} < Sig\ 0,05$ maka H_0 ditolak.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{table}$ dan signifikansi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen. Jika $Sig\ t_{hitung} > Sig\ 0,05$ maka H_0 diterima.

Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
	B	Beta		
(Constant)	3,002	,952	3,155	,002
1 Harga komoditi pangan	1,294	,042	,952	,000

a. Dependent Variable: Inflasi

Sumber : Hasil Data diolah Penelitian 2023

Berdasarkan data pada tabel 4.8 koefisien pada uji t diatas dan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} sebesar 1,66039 yang diperoleh dari tabel t dengan $df = n-k (100-1)$ yaitu 99 dan Sig. 0,05. Berikut pembahasan dari uji t antara variabel Harga komoditi pangan terhadap Inflasi Badan Pusat Statistik Aceh Barat.

Hipotesis 1 : Pengaruh Harga Komoditi Pangan Terhadap Inflasi Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

Hasil uji t untuk variabel harga komoditi pangan (X) terhadap inflasi (Y) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($30,818 > 1,66039$). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap dependen H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti harga komoditi pangan berpengaruh terhadap inflasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat.

KESIMPULAN

1. Hubungan antara variabel independen Harga Komoditi Pangan (X) Inflasi (Y) diformulasikan dengan $Y = 3,002 + 1,294 X + e$. Artinya tanpa Harga Komoditi Pangan tetap ada sebesar 3,002 satuan. Harga Komoditi Pangan memberikan pengaruh positif terhadap Inflasi.
2. Uji Korelasi (R) yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel Harga Komoditi Pangan memberikan pengaruh sangat kuat terhadap Inflasi. Selanjutnya uji Determinasi (R^2) menunjukkan variabel Harga Komoditi Pangan mampu menjelaskan 90,60 % dari Inflasi dan 9,4 % dijelaskan faktor lain di luar variabel penelitian.
3. Secara parsial atau satu-satu Harga Komoditi Pangan (X) memberikan pengaruh signifikan terhadap Inflasi (Y).

SARAN

1. Kiranya pihak Kantor perlu mempertimbangkan Harga Komoditi Pangan yang telah mampu memberikan Inflasi bagi produk pangan.

2. Perlu dilakukan sosialisasi Harga Komoditi Pangan secara berkelanjutan pada Pedagang terutama yang baru sehingga mereka memahaminya.
3. Perlu dilakukan penelitian lain untuk melihat faktor-faktor lain yang belum masuk dalam variabel penelitian ini sebagai faktor yang mempengaruhi inflasi dalam harga komoditi pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andira, G. (2020). Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Pokok terhadap Tingkat Inflasi di Kabupaten Temanggung. *Paradigma Multidisipliner*, 1(2), 111–122. <http://smkn1magelang.sch.id/jpm/index.php/jpm/article/view/1/1>
- Ariefianto, D. (2012). *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Erlangga.
- Atmaja, M. A. J., Kencana, I. P. E. N., & Giandhiadi, G. K. (2015). Analisis Kointegrasi Jumlah Wisatawan, Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap Produk Domestik Regional Bruti (PDRB) Provinsi Bali. *E-Jurnal Matematika*, 4(3), 83–89.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2015). *Data Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2014*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat. (2023). *Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat 2022*.
- Bafadal, A. (2012). Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Pangan Terhadap Inflasi. *Buletin Sosek, Edisi No. 26 Tahun ke-14*, 66–78.
- Demmatadju, R. K. (2012). *Analisis Komoditas Unggulan Regional Sektor Pertanian di Sulawesi Selatan Tahun 2000-2009*. Fakultas Ekonomi - Universitas Hasanuddin.
- Engkus. (2017). Implementasi Undang-Undang Perdagangan Dan Implikasinya Dalam Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. *Litigasi*, 18(1), 1–40. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.284>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 19*. Badan Penerbit Undip.
- Irnawati, I. (2018). Pengaruh Harga Komoditas Pangan Terhadap Inflasi Di Kota Pangkalpinang 2015-2017. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 6(2), 38–61. <https://doi.org/10.33019/equity.v6i02.23>
- Jusar, D., Bakce, D., & Eliza. (2017). Analysis of Rice Price Variation in Riau Province and Supplier Areas. *Jurnal Dinamika Pertanian*, 33(2), 137–144.
- Kementerian Perdagangan. 2017. *Perjanjian Kinerja Tahun 2017*. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- Laili, F., Anindita, R., & Setiawan, Bu. (2014). Volatilitas Harga Gula Dunia dan Harga Gula Domestik. *AGRISE*, 17(3), 1412–1425.
- Leiley, A. M., Timban, J. F. J., & Haryanaioh, O. E. (2020). *Kontribusi Komoditas Pertanian terhadap Inflasi di Kota Manado Tahun 2019*. 16(3), 343–350.
- Sufriadi, D. (2018). Analisis transformasi struktural perekonomian Aceh. *EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI*, 3(2).
- Triyatni, D., Harsono, I., Endang Astuti, Himawan Sutanto, & Ida Ayu Putri Suprpti. (2024). Analisis Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2013-2022. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 2(1), 91~98. <https://doi.org/10.35870/ljit.v2i1.2240>